



Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus (Studi Kasus di Kelurahan Pakelan Kota Kediri)

Ferlita Salsabila Dwiyanti^{1*}, Tauran², Tjitjik Rahaju³, Firre An Suprpto⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: ferlita.22084@mhs.unesa.ac.id^{1*}, tauran@unesa.ac.id², tjitjikrahaju@unesa.ac.id³,
firresuprpto@unesa.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: tauran@unesa.ac.id

Abstract. Community empowerment is an effort to empower vulnerable community groups so they can become more independent and capable. The Kediri City Government has implemented the Prodamas Plus program, which in 2024 will focus on neighborhood-level initiatives in accordance with Kediri Mayor's Regulation No. 28 of 2023. The Pakelan Subdistrict is carrying out this program with a focus on strengthening the "Kampung Keren" initiative due to its unique cultural characteristics. This study employs a qualitative case study approach using William N. Dunn's evaluation model, which encompasses effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, presentation, and verification. The results indicate that the Prodamas Plus program in Pakelan Subdistrict has been implemented fairly well, with tangible impact on infrastructure, the distribution of social assistance and a shift in residents' roles toward becoming active agents of development, and the transformation of residents into active agents of development. However, the program still faces weaknesses, including delays in fund disbursement, suboptimal sustainable economic empowerment, a weak response to urgent needs, and an inflexible planning system. It is recommended that the focus of assistance be shifted toward productive activities accompanied by ongoing guidance, that disbursement mechanism be improved, and that the subdistrict design post-development maintenance plans and strengthen a personalized approach toward passive residents.

Keywords: Community Empowerment; Policy Evaluation; Prodamas Plus; Regional Scale; William Dunn.

Abstrak. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya agar menjadi lebih mandiri dan berkapasitas. Pemerintah Kota Kediri menerapkan Prodamas Plus yang pada tahun 2024 difokuskan pada skala kawasan berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2023. Kelurahan Pakelan menjalankan program ini dengan fokus penguatan Kampung Keren karena memiliki karakteristik budaya yang khas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan kriteria evaluasi William N. Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan telah berjalan cukup baik dengan dampak nyata pada infrastruktur, distribusi bantuan sosial, dan perubahan peran warga menjadi pelaku aktif pembangunan. Namun program masih menghadapi kelemahan berupa keterlambatan pencairan dana, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, lemahnya respons terhadap kebutuhan mendesak, dan ketidakfleksibelan sistem perencanaan. Disarankan agar orientasi bantuan digeser ke arah produktif disertai pendampingan berkelanjutan, pembenahan mekanisme pencairan dana, serta kelurahan merancang pemeliharaan pascapembangunan dan memperkuat pendektan personal terhadap warga pasif.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; Pemberdayaan Masyarakat; Prodamas Plus; Skala Kawasan; William Dunn.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses terencana dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah dalam aspek pembangunan yaitu guna

memperlancar implementasi program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhayati *et al.*, 2025). Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Patilaiya *et al.* (2023) pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan agar menjadi lebih berdaya, mandiri, dan memiliki kapasitas melalui proses dan tahapan yang terintegrasi secara sinergis. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan memegang peranan penting, karena tanpa dukungan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan kesulitan mewujudkan target pembangunan secara maksimal.

Sebagai wujud nyata dari pembangunan partisipasi berbasis pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Kediri menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus atau Prodamas Plus. Program ini merupakan program unggulan yang telah berjalan sejak tahun 2015 dengan mengalokasikan dana langsung kepada setiap Rukun Tetangga (RT) sebagai unit administrasi terkecil, menjangkau 1.478 RT di seluruh Kota Kediri. Pada perkembangannya, program ini mengalami peningkatan cakupan dan alokasi anggaran dari Rp 50 juta per RT per tahun pada periode pertama menjadi Rp 100 juta per RT per tahun pada periode kedua, sekaligus memperluas bidang kegiatan dari tiga bidang menjadi enam bidang yang mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Pada tahun anggaran 2024, berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2023, Prodamas Plus mengalami perkembangan signifikan dengan difokuskan pada skala kawasan, yakni kolaborasi kegiatan seluruh RT dalam satu wilayah kelurahan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja utama pemerintah daerah. Kelurahan Pakelan menjadi salah satu kelurahan yang menjalankan Prodamas Plus skala kawasan dengan fokus penguatan Kampung Keren berbasis potensi budaya dan sejarah lokal, mengingat wilayah ini merupakan bekas kawasan pecinan yang kaya akan peninggalan *heritage* dengan arsitektur Tionghoa dan kuliner legendaris yang menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan kelurahan lain di Kota Kediri.

Dalam penerapannya, Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan telah menunjukkan berbagai capaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dalam praktiknya, tidak semua usulan rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat ketidaksesuaian antara usulan warga dengan kondisi nyata di lapangan, seperti yang terjadi pada usulan pembuatan instalasi hidroponik yang telah mendapatkan alokasi anggaran namun tidak dapat berjalan karena tidak ada warga yang mampu mengelolanya secara berkelanjutan, sehingga dana yang

telah dialokasikan tidak memberikan manfaat yang semestinya. Selain itu, proses pemilihan anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana teknis program juga tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, karena terdapat indikasi bahwa pemilihan anggota Pokmas terkadang tidak semua unsur masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dan keterwakilan antar RT tidak merata. Kondisi-kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan program yang ideal dengan realita pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai Prodamas maupun Prodamas Plus telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Izzuddin dan Rahaju (2022) menyatakan bahwa pada pelaksanaan Prodamas di Kelurahan Bujel masih terdapat kendala yang dihadapi meliputi kekurangan dana untuk kegiatan yang bersifat wajib serta kurangnya komunikasi. Haliim (2019) juga menyatakan bahwa pelaksanaan Prodamas di Kelurahan Ngadisimo masih terdapat hambatan seperti kurang efisien dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan, sehingga pengeluaran dana menjadi berlebihan namun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, Yulistya dan Rahaju (2023) menemukan bahwa Prodamas Plus pada bidang ekonomi di Kelurahan Bangsal memberikan dampak positif terhadap anggota koperasi meskipun dihadapkan dengan tantangan kurang tanggapnya masyarakat untuk memenuhi persyaratan pada kegiatan bidang ekonomi yang terdapat pada Perwali tersebut. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Prodamas Plus tidak semua wilayah sama dan sangat bergantung pada konteks lokal masing-masing wilayah pelaksanaan.

Meskipun kajian tentang Prodamas Plus telah cukup berkembang, namun pada umumnya masih berfokus pada pelaksanaan program dalam skala RT dan cenderung mendeskripsikan proses implementasi tanpa melakukan evaluasi yang mendalam terhadap capaian program secara menyeluruh. Kondisi ini menjadi urgensi tersendiri mengingat pergeseran kebijakan dari skala RT ke skala kawasan membawa dampak yang berbeda terhadap mekanisme partisipasi, distribusi manfaat, dan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus di Kelurahan Pakelan Kota Kediri telah tercapai serta dampaknya bagi masyarakat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah kota dan pihak terkait dalam upaya peningkatan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Nugroho (dalam Dewi, 2022) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil menghasilkan dampak yang diharapkan, melalui perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditentukan. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan memerlukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat demi mencapai sasaran yang telah ditentukan (Affrian, 2023). Hasil dari kebijakan dianggap bernilai karena hasil tersebut memberi sumbangsih terhadap pencapaian tujuan atau target (Kridawati dalam Dewi, 2022). Evaluasi kebijakan publik menjadi tahap akhir dalam rangkaian proses kebijakan publik. Dengan demikian, sebuah kebijakan publik tidak dapat ditinggalkan tanpa pemantauan, tetapi perlu diawasi pelaksanaannya, dan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan adalah melalui "evaluasi kebijakan". Dunn (2003) mengartikan bahwa evaluasi pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penaksiran, pemberian skor, dan penilaian terhadap segala aspek yang berkaitan dengan proses menghasilkan dan menganalisis informasi mengenai nilai serta manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini, Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, meliputi:

Efektivitas

Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu pilihan alternatif dalam meraih hasil atau dampak yang diinginkan, serta mencapai sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat terpenuhi secara nyata dan terukur melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari selesainya suatu program secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu membawa perubahan yang berarti bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya.

Efisiensi

Efisiensi menerangkan bahwa efisiensi terkait dengan besaran sumber daya atau upaya yang dibutuhkan untuk mencapai level efektivitas tertentu. Efisiensi umumnya diukur melalui kalkulasi biaya per unit output atau pelayanan yang dihasilkan. Kebijakan yang mampu mencapai efektivitas maksimal dengan pengeluaran biaya minimal disebut sebagai kebijakan yang efisien. Dalam evaluasi kebijakan, efisiensi tidak hanya melihat aspek keuangan, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya lain seperti waktu, tenaga, dan kapasitas kelembagaan yang tersedia.

Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan nilai atau peluang yang menjadi akar permasalahan yang mendorong lahirnya suatu kebijakan. Kecukupan mempertanyakan apakah pencapaian tersebut benar-benar cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara menyeluruh.

Pemerataan

Pemerataan menyatakan bahwa kebijakan yang mengedepankan pemerataan adalah kebijakan yang upaya serta manfaatnya terdistribusi secara adil kepada seluruh masyarakat yang berhak, tanpa adanya diskriminasi maupun perlakuan yang berbeda. Kriteria menekankan bahwa sebuah kebijakan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, melainkan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasarannya.

Responsivitas

Responsivitas menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari tanggapan masyarakat terhadap implementasinya, termasuk seberapa cepat dan tepat program tersebut merespons aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sebuah kebijakan yang reponsif mampu menyesuaikan dirinya dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga tidak kaku dan tidak terpaku dengan rencana awal yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Ketepatan

Ketepatan, merupakan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi beberapa alternatif yang akan dijadikan rekomendasi dengan cara menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang tepat dan pantas. Kriteria ini tidak hanya menilai apakah suatu program telah mencapai tujuannya, tetapi juga mempertanyakan apakah tujuan tersebut memang layak dan relevan untuk diperjuangkan sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian secara kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Dilapanga dan Rantung (2022) penggunaan metode kualitatif dapat membantu memperluas wawasan tentang fenomena menarik dalam evaluasi serta meningkatkan kedalaman dan detailnya ketika diperlukan, dengan melakukan wawancara, analisis studi kasus, catatan dan dokumen, serta observasi. Ambiyar dan Muharika

(2019) menjelaskan bahwa evaluasi program dengan menggunakan studi kasus berarti peneliti tidak mengontrol program dengan cara apapun, melainkan mengkaji program sebagaimana adanya dengan pendefinisian program, penggambaran lingkungan geografis dan organisasi, penetapan periode historis yang dikaji, identifikasi penerima manfaat, penilaian kebutuhan, serta pemahaman terhadap operasional program dan peran aktor-aktor yang terlibat. Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai evaluasi program dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus (Studi Kasus di Kelurahan Pakelan Kota Kediri). Dalam pembahasan ini, analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan melalui penyusunan secara sistematis dari berbagai informan, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan. Seluruh data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, kemudian dijabarkan dan disusun ke dalam unit-unit analisis yang lebih terstruktur sehingga dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain. Analisis data dilakukan menggunakan kriteria menurut William N. Dunn (2003) meliputi efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), ketepatan (appropriateness), sebagai berikut:

Efektivitas (*Effectiveness*)

Dunn (2003) mendefinisikan efektivitas sebagai kriteria yang berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana Prodmas Plus di Kelurahan Pakelan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian melalui pemberdayaan di skala kawasan.

Jika dilihat dari sisi ketercapaian tujuan di bidang infrastruktur, program ini telah menunjukkan hasil yang paling menonjol dibandingkan bidang lainnya. Berbagai kegiatan perbaikan fisik lingkungan telah berhasil terlaksana dan memberikan dampak yang dapat

dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi, mencakup penerangan jalan umum, paving jalan, perbaikan gapura, pemasangan cctv, serta berbagai perbaikan sarana prasarana lainnya yang mendukung terwujudnya identitas Kelurahan Pakelan sebagai kampung *heritage*. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Rahaju (2020) yang menunjukkan bahwa keberhasilan capaian infrastruktur tidak lepas dari sejauh mana usulan benar-benar berasal dari kebutuhan nyata dan aspirasi aktif masyarakat setempat.

Selain capaian fisik, program berhasil mengubah peran masyarakat dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut berdiskusi, mengusulkan, dan ikut menentukan arah pembangunan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Rahaju (2019) yang menjelaskan bahwa program ini efektif untuk memperkuat keterlibatan aktif masyarakat sekaligus menumbuhkan kemandirian mereka dalam proses pembangunan. Keterlibatan universitas sebagai pendamping lapangan juga memberikan nilai tambah bagi efektivitas program. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abellia *et al.* (2026) yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kualitas pendampingan, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Meskipun demikian, terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan untuk melihat efektivitas program ini. Pertama, belum adanya mekanisme pemeliharaan pascapembangunan yang terstruktur sehingga dapat mempengaruhi nilai efektivitas jangka panjang pada program ini. Persoalan kedua yaitu perubahan Peraturan Walikota yang terjadi setiap tahunnya menyebabkan usulan warga yang telah melalui proses perencanaan panjang akhirnya gugur tanpa dapat diganti dengan usulan alternatif dalam waktu yang singkat. Secara keseluruhan, Prodama Plus di Kelurahan Pakelan telah berjalan cukup efektif meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pemeliharaan pascapembangunan dan stabilitas regulasi.

Efisiensi (*Efficiency*)

Dunn (2003) menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dengan menekankan pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam penelitian ini, efisiensi dievaluasi melalui tiga aspek utamayaitu pengelolaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kesesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan hasil yang dicapai di lapangan.

Jika dilihat dari aspek pengelolaan anggaran, Pokmas Kelurahan Pakelan telah menerapkan mekanisme pengawasan keuangan yang cukup baik melalui kewajiban tanda

tangan ketua dan bendahara untuk setiap pengeluaran dana, serta dilakukannya survei harga sebelum pengadaan barang. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dicairkan secara optimal akibat ketidaksesuaian perencanaan kegiatan dengan regulasi yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Yulistya dan Rahaju (2023) yang menunjukkan bahwa permasalahan efisiensi lebih bersumber dari keterbatasan kapasitas perencanaan di tingkat pelaksana dibandingkan ketidakcukupan anggaran, sehingga penguatan kapasitas perencanaan lebih mendesak dari pada penambahan alokasi anggaran.

Pada aspek ketepatan waktu, keterlambatan pencairan dana menjadi hambatan nyata yang menyempitkan durasi pelaksanaan dan berdampak pada kualitas output yang tidak dapat dimaksimalkan. Dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas teknis SDM lokal untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian teknis tertentu, keterbatasan SDM mengharuskan pelaksana untuk mengandalkan tenaga ahli dari luar, yang secara langsung berdampak pada efisiensi pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 'Ainurroziqin dan Susilo (2024) yang menekankan bahwa diperlukan adanya sumber daya yang terampil dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya aktif dan partisipatif, seperti tenaga teknis dan tenaga ahli yang ditempatkan di bagian Pokmas. Secara keseluruhan, efisiensi Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan perlu diperkuat melalui pembaruan sistem pencairan dana dan investasi jangka panjang dalam pelatihan teknis bagi kelompok usia produktif.

Kecukupan (*Adequacy*)

Menurut Dunn (2003), kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan, nilai, maupun peluang yang menjadi akar dari munculnya suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, kecukupan diartikan sebagai upaya untuk melihat sejauh mana Prodamas Plus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sekaligus meminimalisir peluang munculnya permasalahan baru yang berkaitan dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat di Kelurahan Pakelan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu aspek kecukupan yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. Meskipun Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan telah berupaya mengikutsertakan seluruh warga tanpa terkecuali melalui forum musyawarah, pada kenyataannya tidak semua masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang setara. Warga keturunan Tionghoa di beberapa RT cenderung lebih pasif dalam menyampaikan usulan, bukan disebabkan oleh penolakan terhadap program, tetapi karena karakteristik budaya dan kesibukan aktivitas sehari-hari kelompok tersebut yang cenderung lebih individualis dan berfokus pada urusan usaha pribadi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fimelia *et al.* (2026) yang menegaskan bahwa

kualitas hasil perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif warga dalam forum musyawarah, sehingga diperlukan strategi pendekatan yang lebih personal dan fleksibel terhadap keberagaman karakteristik warga.

Selain itu, kecukupan program ini tidak hanya ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, namun juga hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam program ini diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pakelan, baik dari sisi kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana, bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, data tingkat kesejahteraan keluarga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini kondisi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pakelan:

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Kelurahan Pakelan.

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Keluarga
Keluarga Prasejahtera	0 Keluarga
Keluarga Sejahtera I	250 Keluarga
Keluarga Sejahtera II	292 Keluarga
Keluarga Sejahtera III	258 Keluarga
Keluarga Sejahtera III Plus	164 Keluarga
Total Kepala Keluarga	964 Keluarga

Sumber: Data Tingkat Perkembangan Kelurahan Pakelan Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 964 kepala keluarga tidak terdapat satupun yang masuk dalam kategori Prasejahtera, namun terdapat 250 keluarga atau 25,93% yang berada pada kategori Sejahtera I dan 292 keluarga atau 30,29% pada kategori Sejahtera II. Dengan begitu, terdapat lebih dari separuh kepala keluarga di Kelurahan Pakelan yaitu sekitar 56,22% masih berada pada kondisi ekonomi yang belum optimal dan membutuhkan dukungan program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini menunjukkan peran Prodamas Plus yang dibutuhkan, sekaligus menjadi acuan seberapa besar program ini harus bekerja untuk dapat dikatakan cukup dalam menjawab permasalahan yang ada.

Program ini telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Pakelan melalui bantuan yang beragam bentuknya. Bagi warga yang terdaftar dalam DTKS, berbagai bentuk bantuan seperti gerobak usaha, sembako, dan perlengkapan sekolah terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga secara nyata. Sementara bagi warga yang tidak terdaftar DTKS, manfaat program tetap dapat dirasakan melalui pembangunan infrastruktur lingkungan yang memberikan dampak positif bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Namun demikian, bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Pelatihan UMKM yang diselenggarakan pun masih sangat terbatas, hanya dua perwakilan per RT. Kondisi ini berisiko menumbuhkan pola ketergantungan warga terhadap bantuan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wulandari *et al.* (2026) yang menyatakan bahwa seharusnya masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dibandingkan hanya sebagai penerima bantuan, dengan begitu masyarakat bisa paham jika bantuan bukan sebagai sumber pendapatan utama. Secara keseluruhan, kecukupan program perlu ditingkatkan melalui perluasaan cakupan pelatihan dan pendekatan yang lebih personal dalam menjangkau kelompok masyarakat yang cenderung pasif.

Pemerataan (*Equity*)

Dunn (2003) menjelaskan bahwa kriteria pemerataan berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial, serta merujuk pada bagaimana akibat dari suatu kebijakan dan upaya pelaksanaannya didistribusikan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Penilaian pada kriteria ini menjadi kompleks karena karakteristik demografis Kelurahan Pakelan yang memiliki tingkat keberagaman sosial yang cukup tinggi, dimana hampir separuh penduduknya yaitu sebesar 48,68% merupakan pemeluk agama non-Islam yang sebagian besar berasal dari latar belakang etnis Tionghoa.

Dari sisi distribusi bantuan sosial, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam menjamin objektivitas distribusi program. Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti *et al.* (2025) mengenai implementasi bantuan sosial berbasis DTKS di Kota Semarang yang menemukan berbagai persoalan ketidakakuratan data, termasuk masuknya individu yang sudah meninggal atau telah berpindah domisili sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep penggunaan DTKS sebagai basis distribusi bantuan sosial merupakan mekanisme yang tepat dan objektif, dalam praktiknya kualitas yang dihasilkan bergantung pada keakuratan data itu sendiri.

Dari sisi pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, pendekatan skala kawasan yang diterapkan pada tahun 2024 memastikan pembangunan tidak terpusat pada wilayah tertentu, melainkan didasarkan pada penilaian kebutuhan seluruh wilayah secara menyeluruh. Kemampuan Pokmas dalam menjalankan peran ini didukung oleh bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri sebelum program berjalan dan diperkuat oleh mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai instansi mulai dari Inspektorat, Aparat Penegak Hukum yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Babinsa, Kecamatan, hingga Pemerintah Kota.

Dari sisi penerimaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum warga Kelurahan Pakelan menilai distribusi manfaat program ini telah berjalan dengan cukup adil. Temuan ini justru berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan

Subekti (2025) mengenai pelaksanaan Prodamas Plus di Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul yang menemukan bahwa masyarakat tidak merasakan keberpihakan program terhadap sektor tenun ikat, terdapat kelemahan koordinasi, dan distribusi informasi yang tidak merata. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerataan distribusi manfaat Prodamas Plus sangat ditentukan oleh mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Secara keseluruhan, pemerataan distribusi manfaat Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan secara umum telah berjalan dengan cukup baik, meskipun pembaruan DTKS secara berkala harus terus dimaksimalkan.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Menurut Dunn (2003), responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan, preferensi, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu yang menjadi target dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, responsivitas secara khusus ditujukan untuk menilai sejauh mana respons yang diberikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung Prodamas Plus.

Dari aspek mekanisme penampungan aspirasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan telah membangun sistem penyaluran aspirasi yang berjalan secara berlapis. Penyampaian aspirasi dalam program ini tidak hanya berjalan melalui jalur formal, tetapi juga berkembang melalui komunikasi informal yang justru lebih dominan digunakan oleh warga di lapangan. Warga dan para pengurus RT cenderung langsung berkoordinasi dengan Pokmas sebagai pihak yang paling dekat dan mudah dijangkau, mencerminkan terbentuknya kepercayaan sosial antara warga dengan pelaksana program.

Dari aspek kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, hadirnya Prodamas Plus menciptakan pembagian fungsi yang lebih baik antara Prodamas Plus dengan Musrenbang. Kebutuhan dengan cakupan lebih kecil hingga menengah dapat langsung direspons melalui anggaran Prodamas Plus, sementara musrenbang dapat lebih fokus menampung kebutuhan yang memerlukan anggaran dengan cakupan lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar musrenbang selama ini adalah banyaknya usulan masyarakat yang tidak berhasil terakomodasi, dan kondisi inilah yang kemudian diisi oleh Prodamas Plus sehingga mendorong partisipasi masyarakat hingga ke unit administrasi terkecil.

Namun demikian, analisis terhadap responsivitas program ini juga memiliki catatan penting yang perlu dicermati. Pertama, program belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan spesifik dari kelompok usaha kecil yang tidak terdaftar dalam DTKS, seperti ibu-ibu pedagang makanan yang membutuhkan pelatihan pengelolaan usaha. Kelompok ini berada

di zona abu-abu, yakni tidak cukup kekurangan untuk masuk dalam kategori DTKS namun juga tidak memiliki akses terhadap program pemberdayaan yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yulistya dan Rahaju (2023) yang menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui Prodamas Plus cenderung tersalurkan melalui kelembagaan formal seperti koperasi yang memiliki keanggotaan dan persyaratan tertentu, sehingga warga yang tidak tergabung sebagai anggota koperasi maupun tidak memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan berpotensi tidak terjangkau oleh manfaat program. Kedua, program belum mampu merespons kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak terencana akibat keterikatan pada sistem perencanaan yang kaku. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Prodamas Plus di Kelurahan Pakelan secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun perlu diperkuat melalui perluasan cakupan program serta penyediaan mekanisme penanganan kebutuhan mendesak yang lebih fleksibel.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Menurut Dunn (2003), ketepatan merupakan kriteria yang berfungsi untuk menyaring berbagai alternatif yang akan dijadikan rekomendasi kebijakan, yakni dengan menilai apakah hasil yang dihasilkan dari alternatif yang dipilih tersebut benar-benar merupakan tujuan yang paling sesuai dan layak untuk diterapkan. Dalam penelitian ini, ketepatan digunakan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan Prodamas Plus sudah sesuai, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Pakelan.

Salah satu aspek penting yang mencerminkan ketepatan program sejak tahap paling awal adalah diselenggarakannya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Kediri sebelum kegiatan resmi berjalan. Langkah ini memperlihatkan kesadaran pemerintah agar seluruh pihak yang terlibat memahami tujuan, mekanisme, dan batasan-batasan yang berlaku sebelum program dijalankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 'Ainurroziqin dan Susilo (2024) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung suksesnya pelaksanaan program ini adalah dengan adanya sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan bimbingan teknis untuk mendukung berjalannya Prodamas sesuai dengan tujuan kebijakan.

Jika dilihat dari kesesuaian program terhadap permasalahan nyata, kehadiran Prodamas Plus tepat untuk menjawab persoalan yang sudah lama terjadi di tingkat RT, mencakup rendahnya partisipasi warga, tidak optimalnya forum musyawarah dan tidak adanya sumber pendanaan yang terstruktur. Perubahan peran masyarakat dari penerima manfaat yang pasif, kini berperan sebagai subjek aktif yang terlibat langsung mulai dari proses perumusan kebutuhan hingga pelaksanaan kegiatan menjadi bukti paling kuat ketepatan program dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Irameimuna dan Tauran (2016) yang menunjukkan bahwa keberhasilan peran masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan sangat ditentukan oleh tersedianya forum musyawarah yang memungkinkan warga benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan program juga terlihat dari kesesuaian jenis bantuan dengan karakteristik ekonomi masyarakat Kelurahan Pakelan yang sebagian besar bekerja di sektor jasa dan perdagangan skala kecil. Bantuan berupa gerobak usaha dan pelatihan UMKM yang dirancang dalam Prodama Plus menjadi pilihan yang tepat karena warga yang sebagian besar berada di sektor informal dan usaha kecil memang paling membutuhkan akses terhadap peralatan usaha yang produktif dan penguatan keterampilan berwirausaha.

Namun terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan. Pertama, kecenderungan sebagian bantuan yang masih bersifat konsumtif berpotensi menumbuhkan ketergantungan yang bertentangan dengan tujuan pemberdayaan. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang ditetapkan dalam sistem perencanaan dengan kebutuhan nyata di lapangan, dimana anggaran yang sebenarnya masih tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terkunci oleh batasan sistem yang tidak fleksibel. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan Prodama Plus di Kelurahan Pakelan sudah cukup baik, namun perlu diperkuat melalui orientasi bantuan ke arah yang lebih produktif dan peningkatan fleksibilitas sistem perencanaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodama) Plus (Studi Kasus di Kelurahan Pakelan Kota Kediri) menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2003). Berdasarkan hasil penelitian, Prodama Plus di Kelurahan Pakelan secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari sisi efektivitas, program berhasil mencapai tujuan utamanya terutama pada bidang infrastruktur dan mendorong perubahan peran warga menjadi pelaku aktif pembangunan, meskipun terkendala ketidakstabilan regulasi dan belum tersedianya mekanisme pemeliharaan pascapembangunan yang terstruktur. Dari sisi efisiensi, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah berjalan cukup baik, namun keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan kapasitas teknis SDM lokal masih menjadi hambatan yang perlu segera diselesaikan. Dari sisi kecukupan, program telah memadai dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan bantuan sosial jangka pendek, namun belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan karena bantuan yang disalurkan masih

didominasi oleh bentuk konsumtif. Dari sisi pemerataan, distribusi manfaat program telah berjalan secara adil dan tidak diskriminatif berkat penggunaan data DTKS yang objektif, pendekatan skala kawasan, dan mekanisme pengawasan berlapis, meskipun pembaruan data penerima manfaat secara berkala tetap menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Dari sisi responsivitas, program telah membangun mekanisme penampungan aspirasi yang cukup efektif dan berhasil menciptakan sinergi dengan Musrenbang sebagai dua jalur perencanaan yang saling melengkapi, namun masih lemah dalam merespons kebutuhan mendesak yang tidak terencana akibat kekakuan sistem perencanaan. Dari sisi ketepatan, program terbukti relevan dalam menjawab permasalahan nyata masyarakat dan tepat dalam memilih jenis bantuan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi warga, meskipun masih perlu diperkuat pada aspek orientasi bantuan yang lebih produktif dan fleksibilitas sistem perencanaan di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya difokuskan pada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Pakelan, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kelurahan pelaksana Prodama Plus di Kota Kediri. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji pelaksanaan pada periode kebijakan skala kawasan tahun anggaran 2024, sehingga dinamika perubahan program pada periode sebelumnya tidak tercakup secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Kediri perlu menggeser orientasi bantuan dari konsumtif menuju produktif yang disertai pendampingan usaha berkelanjutan melalui kerja sama lintas dinas, memperluas cakupan dan materi pelatihan sesuai karakteristik ekonomi masyarakat setempat, serta membenahi mekanisme pencairan dana dengan menetapkan regulasi teknis lebih awal dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar terhadap penyesuaian volume pekerjaan di lapangan. Pihak Kelurahan Pakelan dan Pokmas perlu merancang mekanisme pemeliharaan pascapembangunan yang terstruktur melalui pembentukan kelompok pemelihara fasilitas di tingkat RT, sekaligus memperkuat pendekatan personal dalam menjangkau warga yang cenderung pasif agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan setara untuk menyuarakan kebutuhan dan menerima manfaat program secara adil dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian evaluasi Prodama Plus dilakukan secara komparatif di beberapa kelurahan dengan karakteristik berbeda guna menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program secara keseluruhan di tingkat kota.

DAFTAR REFERENSI

- Ainurroziqin, M., & Susilo. (2024). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Kelurahan Ngronggo Kota Kediri). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 149–156.
- Abellia, V. S., Puspasari, V. R., Prabawati, I., & Suprpto, F. A. (2026). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Daerah Malang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1).
- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). *Participatory Budgeting in Indonesia: from the Policy Innovation to the Democracy Innovation*. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565.
- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV Bintang Semesta Media.
- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Anggraeni, Y., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pembangunan Infrastruktur di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri). *Publika*, 7(8).
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi* (J. Harsono, Ed.). Samudra Biru.
- Dilapanga, A. R., & Rantung, M. I. R. (2022). *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*. Deepublish Digital.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin, Ed.; Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Fimelia, Q., Farid, M. M., Pradana, G. W., & Suprpto, F. A. (2026). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan dalam Forum Musrenbangdes di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 3(1), 287–301.
- Haliim, W. (2019). Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–11.
- Irameimuna, A., & Tauran. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (Studi pada RT: 01 RW: 05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri). *Publika*, 4(4), 1–8.
- Izzuddin, M. A., & Rahaju, T. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Pada Bidang Kesehatan Di Masa Pandemi Covid – 19 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Publika*, 10(2), 557–570.
- Nur, U. A., & Rahaju, T. (2020). Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Publika*, 8(5), 1–11.
- Nurhayati, Sumiyati, Juariyah, Paramitha, S. (2025). Otonomi Daerah. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 856–867.

- Patilaiya, H. La, Sinurat, J., Sarasati, B., Siburian, D., Mahaza, Maesarini, I. W., & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori Pemberdayaan Masyarakat* (R. M. Sahara, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Wijayanti, C. D., Soegianto, S., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2025). Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang. *Journal Juridisch*, 3(3), 221–235.
- Wulandari, R. M., Nuzula, H. F., Prabawati, I., & Suprpto, F. A. (2026). Optimalisasi Peran Masyarakat Gresik terhadap Program Keluarga Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan Sosial dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan. *Abdimas Singkerru*, 6(1), 85–96.
- Yulistya, G. I., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus Pada Bidang Ekonomi di Kelurahan Bangsal Kota Kediri (Studi Pada Koperasi Sehat Sejahtera Erwe 2 Bangsal). *Publika*, 11(2), 1697–1710.
- Zahra, N. A., & Subekti, T. (2025). Mengurai Jejak Pemberdayaan : Studi Implementasi dan Tantangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus di Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul. *Journal of Governance and Policy*, 5(3), 355–367.